



PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PDI PERJUANGAN, PKB, & PBB
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG :

1. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
2. PENYELENGGARAAN TENAGA KERJA
3. RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS PROVINSI
DANAU MANINJAU TAHUN 2019-2039

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,
Salam Sejahtera bagi kita sekalian

Merdeka!!!

- Yang Terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat
- Yang Terhormat Saudara Kepala SKPD Dilingkungan Provinsi Sumatera Barat
- Yang Terhormat Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat
- Yang Terhormat Sekretaris Dewan Beserta Jajaran

Terimakasih kepada Pimpinan yang telah memberikan waktu kepada Fraksi PDI Perjuangan, PKB & PBB untuk menyampaikan Pendapat Akhir terhadap tiga Ranperda: 1). Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, 2). Tentang Penyelenggaraan Tenaga Kerja, dan 3). Tentang Rencana Tata Ruang Strategis Provinsi Danau Maninjau, sebelum kami menyampaikan Pendapat Akhir ini, izinkan kami terlebih dahulu mengajak kita semua yang hadir dalam ruangan ini bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan Rapat Kerja Pembahasan Akhir Komisi Terkait dengan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi atas

tiga Ranperda tersebut di atas, dan Shalawat serta salam mari kita sama-sama sanjungkan kearwah nabi besar kita, Muhammad SAW junjungan alam pembawa perubahan dikehidupan manusia dari alam kegelapan menuju sinar kemajuan - minazzulumati ilannur- sebagaimana yang kita rasakan hari ini, serta selalu kita dambakan safaatnya siang dan malam.

Ketua, dan Segenap Anggota Dewan yang kami hormati, serta hadirin yang kami muliakan

Dapat kami sampaikan bahwa dalam beberapa waktu setelah penyampaian Pandangan Umum atas tiga Ranperda tersebut dan dilanjutkan pembahasan yang mendalam dikomisi-komisi terkait bersama dengan SKPD Pemerintah Daerah Prov. Sumatera Barat terkait dimasing-masing Ranperda tersebut di atas, serta kami melakukan pembahasan-pembahasan di Rapat Fraksi atas tiga ranperda tersebut sebagai rangkaian terakhir dari tiga Raperda ini, maka dengan ini Fraksi PDI Perjuangan, PKB & PBB menyampaikan Pendapat Akhirnya sebagai berikut:

1. RANPERDA TENTANG PENEYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Sebagaimana yang Fraksi kami sampaikan pada Pandangan Umum Fraksi kami beberapa bulan yang lalu bahwa, sesuai dengan perkembangan waktu beberapa perundang-undangan mengalami perubahan dan perbaikan sehingga peraturan-peraturan yang terdahulu yang tidak mengacu pada perundangan yang baru akan mengalami perubahan diantaranya adalah Perda Nomor 2 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 dan pada saat ini landasan untuk Urusan pendidikan mengacu pada UU nomor 23 tahun 2014, sehingga Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengajukan pengganti Perda No 2 Tahun 2009 dengan maksud:

- a. Memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengelola urusan pendidikan yang menjadi kewenangan
- b. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan dasar urusan pendidikan

Fraksi PDI Perjuangan, PKB & PBB memberikan apresiasi pada kawan-kawan di Komisi V yang telah bekerja bersama-sama dengan SKPD terkait dalam rangka memaksimalkan pembahasan tentang Ranperda ini agar setelah disahkan Ranperda ini dapat berguna bagi masyarakat serta pemerintah dalam menjalankannya, dan Fraksi kami juga memberikan kritikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bahwa Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan ini mengalami perlambatan karena berdasarkan UU bahwa Penyelenggaraan Pendidikan tingkat SLTA/SMK sudah dimulai tahun 2017

yang lalu dan selanjutnya izinkan Fraksi kami memberikan pendapat sebagai berikut:

1. Tentang Pengelolaan serta manajemen SLTA/SMK harus terarah dimana penempatan kepala sekolah SLTA/SMK tidak hanya berdasarkan kepada track record dan kecerdasan secara tertulis tetapi juga harus mempunyai kecerdasan emosional dan sosial, contoh pada baru-baru ini ada kepala sekolah yang didemo oleh anak didik yang menurut kami bahwa kepala sekolah tersebut mempunyai kecerdasan secara tertulis tetapi belum cerdas dalam urusan emosional dan sosial.
2. Tentang sarana kebutuhan peserta anak didik termasuk buku pegangan, sesuai dengan UU bahwa pendidikan adalah merupakan kebutuhan dasar, maka kebutuhan anak didik harus ditanggung oleh pemerintah diantaranya buku pegangan anak didik, yang selama ini kita lihat sekolah memfasilitasi untuk menjual buku kepada anak didiknya, kedepan diharapkan ini tidak terjadi lagi.

Berkaitan dengan penganggaran ini Fraksi kami mengharapkan kosnisitennya Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk penganggaran penyelenggaraan pendidikan di tingkat SLTA/SMK yang sudah menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

3. Tentang pengelolaan sumber dana pendidikan disekolah seperti dana BOS, dana BOP dan dana bantuan dari orang tua murid kepada sekolah diharapkan harus transparan dalam penggunaannya. Kami menyadari dana bantuan dari pemerintah seperti dana BOS dan dana BOP memang belum optimal maka sesuai dengan UU bahwa orangtua murid juga bertanggung jawab terhadap kemajuan sekolah dan berpartisipasi dalam bantuan dana sekolah.

Fraksi kami dalam hal ini meminta kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai penyelenggara pendidikan tingkat SLTA/SMK sudah seharusnya mempunyai manajemen dan sistem yang baik supaya sumber-sumber dana tersebut menjadi kepuasan untuk memajukan sekolah dan Orang tua anak didik akan terus berupaya membantu memajukan sekolah dengan dana bantuan orang tua anak didik sejauh kepala sekolah transparan dalam pengelolaan dana sekolah tersebut.

4. Dalam hal mutasi, promosi pejabat di sekolah, Fraksi kami meminta pejabat yang ditempatkan tentu diharapkan dapat meningkatkan sistem yang sedang berlaku selama ini, bukan sebaliknya.

5. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat merupakan pengguna anggaran yang terbesar baik dari APBN maupun APBD tapi dana yang besar tersebut hampir-hampir tidak diketahui oleh masyarakat dan termasuk kebijakan-kebijakannya, untuk itu Fraksi kami berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini Dinas Pendidikan Sumatera Barat betul-betul bisa menyampaikan kepada masyarakat agar kegiatan-kegiatan Dinas Pendidikan yang pengguna anggaran terbesar itu dapat diketahui oleh masyarakat.

Selanjutnya Fraksi kami meminta dalam hal kegiatan-kegiatan Dinas Pendidikan tersebut pembelajaran tentang etika dan sikap / tingkah laku tetap ditingkatkan karena anak didik kita pada saat ini sudah dimulai digrogoti oleh perilaku-perilaku yang tidak baik.

6. Tentang disiplin guru dan karyawan, Fraksi kami berpendapat tanpa disiplin yang tinggi dan konsisten tentu hasil mutu pendidikan kita tidak optimal, diharapkan pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan betul-betul menerapkan disiplin tersebut agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan kita.

2. RANPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN TENAGA KERJA

Fraksi PDI Perjuangan, PKB & PBB memberikan apresiasi kepada kawan-kawan DPRD Provinsi Sumatera Barat khususnya kawan-kawan yang berada di Komisi II yang telah berusaha melahirkan sebuah peraturan daerah yang sangat berguna pada saat ini yaitu Perda tentang Penyelenggaraan Tenaga Kerja ditengah beberapa persoalan tentang ketenaga kerjaan yang terjadi saat ini.

Sesuai dengan Nota Penjelasan yang disampaikan, Ranperda ini bertujuan diantaranya adalah:

1. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah
2. Menjamin pelaksanaan yang sama tanpa diskriminasi atas dasar apapun bagi tenaga kerja/buruh
3. Menjaga hubungan industrial yang harmonis

Dan kita ketahui Ranperda ini telah menjalankan tahapan-tahapan pembahasan yang begitu panjang dengan penuh keseriusan, hari ini fraksi-fraksi akan memberikan pendapat akhirnya sebagai bagian rangkaian terakhir sebelum

disahkan, Fraksi PDI Perjuangan, PKB & PBB memberikan pendapat sebagai berikut:

1. Persaolan ketenaga kerjaan memang persoalan yang sangat penting, untuk itu Fraksi kami meminta kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat setelah Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan ini disahkan agar dapat mensosialisasikan kemudian mensinergikan ketengah masyarakat terutama kelompok pemberi kerja/pengusaha.
2. Fraksi kami mengingatkan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bahwa tentang ketenaga kerjaan sangat berkait dengan soal investasi, jangan niat yang mulia dalam hal memperhatikan ketenaga kerjaan membuat iklim investasi di Sumatera Barat yang sudah ada stigma kurang bagus menjadi semakin tidak bagus.

3. RANPERDA TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS PROVINSI DANAU MANINJAU TAHUN 2019-2039

Sebelum kami bacakan pendapat Fraksi ini terlebih dahulu Fraksi PDI Perjuangan, PKB & PBB memberikan apresiasi kepada Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat yang telah bersungguh-sungguh menjalankan fungsi legislasi sehingga Ranperda Tentang Rencana Tata Ruang Strategis Provinsi Danau Maninjau tahun 2019-2039, dapat diselesaikan dengan baik

Selanjutnya dapat kami sampaikan bahwa setelah penyampaian Pandangan Umum atas Ranperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Maninjau Tahun 2018-2038 tersebut dan dilanjutkan pembahasan yang mendalam serta melakukan pembahasan-pembahasan di rapat Fraksi atas ranperda ini, dengan ini Fraksi PDI Perjuangan, PKB & PBB menyampaikan Pendapat Akhirnya sebagai berikut:

1. Fraksi PDI Perjuangan, PKB & PBB, sangat setuju Ranperda ini disahkan agar Danau Maninjau yang merupakan salah satu ikon Sumatera Barat dapat terjaga dengan baik
2. Tentang adanya keinginan mengurangi/penetapan KJA menjadi 6000 KJA sesuai pasal 33 dalam Ranperda ini, dalam hal ini Fraksi kami memberikan catatan, karena ini menyangkut teknis dan sumber persoalan maka seharusnya angka 6000 KJA tidak dicantumkan dalam Perda, menurut Fraksi kami sebaiknya dicantumkan ke dalam Peraturan Gubernur sesuai dengan kajian - kajian yang mendalam tentang jumlah

KJA yang ramah bagi Danau Meninjau, sehingga dapat bertungsi sesuai dengan yang diinginkan.

3. Fraksi kami juga meminta agar Keramba Jaring Apung (KJA) yang akan diperuntukan pernagari benar-benar di perioritas untuk masyarakat setempat yang berekonomi lemah.
4. Setelah Ranperda ini disahkan, diharapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membentuk suatu Tim Penelitian, Tim Sosialisasi, Tim Pengawasan sesuai yang diatur dalam Perda ini.

Hadirin Yang Kami Hormati ,

Sebagaimana yang kami sampaikan di atas melalui Rapat ini Fraksi kami meminta kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bahwa tiga Ranperda yang akan kita tetapkan ini yang menurut Fraksi kami sangat berkaitan dengan hajat orang banyak dan sangat berkaitan dengan masa depan anak bangsa diharapkan segala sesuatu yang menyangkut pelaksanaannya agar menjadi perhatian yang serius sehingga tiga ranperda ini dapat berguna sesuai dengan tujuan dari masing-masing Raperda ini dan Fraksi kami dapat menyetujui tiga Ranperda untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan, PKB & PBB ini kami sampaikan, atas segala perhatian Rapat Kerja ini kami mengucapkan banyak terimakasih.

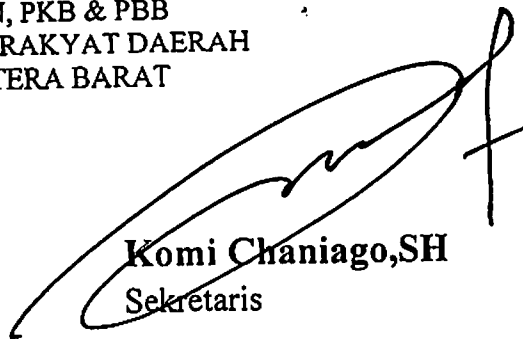
Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Padang, 27 Maret 2019

PIMPINAN FRAKSI
PDI PERJUANGAN, PKB & PBB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT



Albert Hendra Lukman, SE
Ketua



Komi Chaniago, SH
Sekretaris

Juru Bicara